



Judul : Jepang Percepat Izin Edar Obat Covid-19
Tanggal : Selasa, 08 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Jepang Percepat Izin Edar Obat Covid-19

TOKYO, SENIN — Pemerintah Jepang mempertimbangkan percepatan izin edar dan izin penggunaan tablet obat Covid-19 yang dikeluarkan perusahaan farmasi Shionogi. Pengobatan memakai obat-obatan oral dinilai sebagai perkembangan positif penanganan pandemi, di samping percepatan vaksinasi massal. Organisasi Kesehatan Dunia menargetkan 70 persen penduduk global telah divaksinasi penuh pada pertengahan tahun 2022.

"Kalau izin ini diberikan pemerintah, kemungkinan pekan depan (obat) sudah keluar. Kami bisa menetapkan jadwal pada Maret nanti untuk memproduksi 1 juta dosis. Pada tahun fiskal berikutnya yang dimulai April, kami bisa memproduksi 100 juta dosis," kata Direktur Utama Shionogi Isao Teshirogi, di Tokyo, Jepang, Senin (7/2/2022).

Tablet yang diproduksi oleh Shionogi saat ini masih menggunakan kode nama S-217622. Sejauh ini, obat baru diujicobakan kepada pasien Covid-19 bergejala ringan dan tidak bergejala. Setelah empat hari mengonsumsi obat, tampak di tubuh mereka terjadi penurunan jumlah virus korona baru sebanyak 63-80 persen. Teshirogi mengungkapkan, uji klinis secara global akan dilakukan pada akhir Februari. Selain itu, Shionogi juga hendak memulai uji klinis terhadap kelompok pasien Covid-19 bergejala sedang. Belum ada keterangan apabila mereka akan menguji obat ini kepada pasien bergejala berat, pasien dengan komorbid, dan pasien dengan penyakit yang menyerang kekebalan tubuh.

Aturan yang pelik Dilansir dari surat kabar Mainichi, peraturan pemberian izin edar dan pakai obat di

Jepang cukup pelik. Khusus obat-obatan produksi asing, Pemerintah Jepang mau memberi percepatan izin apa-bila sudah ada bukti-bukti klinis dari negara-negara besar, misalnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, atau data kolektif dari banyak negara kecil. Namun, percepatan izin tidak bisa diberikan pada obat yang diproduksi di dalam negeri. Oleh sebab itu, Pemerintah Jepang bermaksud mengubah aturan tersebut. Rancangan aturan tengah dibahas oleh Diet atau parlemen Jepang. Salah satu faktor yang membuat pembahasan kompleks, persepsi percepatan izin ini adalah untuk obat-obatan terkait Covid-19. Harus dipikirkan pengaruhnya terhadap obat-obatan penyakit lain. Pada saat yang sama, Pemerintah Jepang telah memberi izin untuk mengimpor obat Covid-19 Molnupiravir buatan Merck dan Paxlovid buatan Pfizer. Permasalahannya, karena ini obat-obatan impor, Jepang tidak bisa membeli dalam jumlah banyak. Pengadaannya juga membutuhkan waktu karena AS dan Eropa sudah menetapkan pesanan dalam partai besar. Jepang merupakan negara maju dan anggota dari tujuh negara terkaya di dunia (G-7). Akan tetapi, dari segi vaksinasi, Jepang tertinggal dibandingkan rekan-rekan sesama G-7. Secara skala, jumlah penduduk Jepang yang sudah divaksinasi Covid-19 lengkap mencapai 80 persen. Jumlah tersebut tidak mengurangi penularan Covid-19. Pada Minggu (6/2) dilaporkan ada 90.000 kasus positif baru. Sejak awal pandemi tahun 2020, Jepang telah mencatat total 3,3 juta kasus positif dan 19.000 kematian. Pemerintah pusat dan beberapa prefektur masih mendiskusikan kemungkinan pembatasan sosial lagi. Jepang belum pernah menerapkan karantina wilayah. "Pemerintah akan terus mengebut proses vaksinasi. Saat ini, baru 5 persen penduduk yang sudah disuntik dosis penguat. Kami menargetkan, pada akhir Februari ini bisa disuntikkan total 1 juta dosis," tutur Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sama seperti pendahulunya, Yoshihide Suga, Kishida dinilai masyarakat Jepang tidak becus menangani pandemi. Prosedur vaksinasi lambat karena pemerintah seolah ti-

dak mumpuni mencari tempat penyuntikan vaksin dan mengumpulkan warga. Masyarakat menilai pemerintah kurang berinisiatif jemput bola.

Obat-obatan

Covid-19

memberi harapan baru bagi masyarakat terkait terapi pemulihan ketika tertular. Meskipun demikian, para pakar kesehatan secara umum menekankan bahwa vaksinasi tetap pertahanan pertama. Di AS, pemberian obat-obatan Covid-19 sangat dibatasi. Ada tiga kelompok yang diprioritaskan, yaitu orang dengan penyakit yang mengurangi kekebalan tubuh (immunocompromised), orang berusia 75 tahun ke atas yang tidak divaksin, dan orang berusia 65 tahun ke atas yang tidak divaksin serta memiliki penyakit komorbid ataupun obesitas.

Dilansir dari NBC, studi ilmiah Paxlovid hanya memakai sampel orang-orang yang tidak divaksin karena alasan kesehatan. Tidak ada keterangan Paxlovid bermanfaat atau justru kontraproduktif terhadap orang yang divaksin. Ini membuat pemerintah berhati-hati dalam merekomendasikan pemakaiannya. (REUTERS/DNE)